

MENELAAH PAHAM KEBANGSAAN MUHAMMADIYAH

Infra Wilindaya

email: infa.serantaunews@gmail.com

Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi
Universitas Muhammadiyah Riau

Abstract

The mission of Da'wah and the Tajajid Movement (Renewal) is an indisputable fact towards the birth of Muhammadiyah. How Kyai Dahlan thought ahead about building schools, changing the direction of the Gede Kauman Mosque, Al-Maun's theology by empowering the surrounding community is an example of the Muhammadiyah movement which is still engraved in every heart of the leadership of the congregation to this day.

But the contact that finally collided with the nationality value that made Muhammadiyah out of the 'nest'. But of course this is inevitable, Muhammadiyah as one of the largest mass organizations in Indonesia in the practice of preaching will surely be dragged on the dynamics of national life.

Keyword : **Muhammadiyah, Indonesia, Nation**

Pendahuluan

Sepanjang Satu Abad perjalanan usianya, Muhammadiyah masih tetap berpegang teguh kepada Khittahnya sebagai Organisasi Sosial Dakwah yang berkemajuan, tak ada persinggungan langsung dengan politik praktis, meskipun kerap di tarik dalam arus

politik, namun Muhammadiyah melalui para elite pimpinannya masih setia dalam koridornya. Jikalau ada yang mengaitkan dengan kepentingan ummat, maka Muhammadiyah lebih senang menyebutnya dengan paham kebangsaan. 'Budaya' sebagai organisasi Modern yang egaliter, bukan individual

apalagi mengkultuskan suatu pimpinan atau person juga turut mempengaruhi berbagai kebijakan Organisasi Sosial tertua di Indonesia ini.

Muhammadiyah sama sekali tidak alergi dengan politik, bahkan dalam kaca mata penulis, Muhammadiyah saat ini memainkan peran yang sangat ciamik ditengah percaturan politik, yang mana di era digital sebuah wacana yang dilontarkan Muhammadiyah selalu hangat diperbincangkan di kalangan terdidik, menengah, dan kawasan perkotaan sebagaimana banyak Muhammadiyah tumbuh dan berkembang. Pernah dalam suatu kesempatan, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah, Hadjriyanto Y Thohari menyampaikan jika dulu Muhammadiyah menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik, maka kini Muhammadiyah menjaga kedekatan yang sama dengan Partai Politik sebagai lembaga politik.

Lihatlah bagaimana pesan Pimpinan Pusat Muhammadiyah misalkan dalam menghadapi tahun politik seperti saat ini, Persyarikatan

(baca ; Muhammadiyah) menganggap kontestasi politik ini adalah hal yang normal dan menjadi rutinitas sebagai Negara Demokrasi, jangan sampai agenda lima tahunan ini menjadi ajang merusakkan bangunan keummatan yang sudah lama tertanam, menjaga keutuhan bangsa adalah hal yang paling utama.

Meskipun sebagai organisasi besar, dengan akar dan jaringan yang langsung ke akar masyarakat, Muhammadiyah menyadari kompetisi terbuka ini akan menyeret warga Muhammadiyah dalam hal dukungan, namun jangan lah sampai saling menjelekkkan, merasa paling benar , apalagi sampai merusak ukhuwah sebagai sesama anak bangsa.

Ambil contoh lagi ketika menjelang Muktamar ke-47 di Makassar tahun 2015 lalu, dimana Muhammadiyah mengeluarkan agenda besar berupa Indonesia sebagai 'Darul Ahdi wa Syahadah' yang berarti Negara sebagai tempat kesepakatan bersama, Konsensus Nasional, karena Negara berdiri atas kemajemukan,

kebhinnekaan golongan, suku, agama, dll dalam bingkai Pancasila.

Paham Indonesia sebagai 'Darul Ahdi wa Syahadah' penulis nilai sebagai gagasan besar dari para pimpinan persyarikatan dalam menunjukkan kedewasaannya sebagai elemen bangsa untuk Negara ini.

Tulisan dan penelitian ini juga akan mengupas lebih dalam bagaimana Muhammadiyah memandang konsep kebangsaannya.

Muhammadiyah dan Persinggungan Politik

Politik bukanlah hal yang tabu apalagi haram bagi Muhammadiyah, acap kali Muhammadiyah selalu disinggung-singgung atau di seret dalam pusaran politik, namun sekali lagi, Muhammadiyah hanya akan 'bersuara' jika menyangkut kepentingan ummat, kepentingan dakwah, yang mana semua kebijakan bisa dikatakan tak akan terlepas dari putusan politik. Berulang kali Muhammadiyah menyampaikan ranahnya bukanlah ranah praktis, karena memang bukan

organisasi politik, meskipun banyak kader ataupun warga persyarikatan yang terjun ke politik praktis.

Siapapun kader yang turun ke gelanggang politik, pasti akan di restui, apalagi mampu membawa *political will*, kebaikan, dan memberi warna bagi kebijakan dakwah bagi setiap partai yang dapat memberikan manfaat untuk orang banyak. Tapi warga Muhammadiyah, sebagai salah satu pemilih rasional, tak akan serta merta langsung bisa di giring untuk pilihan politiknya.

Salah satu contoh, menurut survey Alvara research di tahun 2017, orang Muhammadiyah di Indonesia itu ada di angka 14,5 persen, kalau di afiliasikan dengan politik, maka mestinya Partai yang didirikan oleh salah seorang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais bisa memperoleh di angka tersebut. Ini menunjukkan warga Muhammadiyah punya independensi nya sendiri dalam urusan politik.

Dalam aturan Organisasi, secara jelas juga tertuang di setiap dokumen

resmi seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Khittah dan Rekomendasi Tanwir maupun Mukhtamar, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dan sebagainya, menyebutkan bahwa Organisasi ini adalah Organisasi dakwah sosial amar maruf nahi munkar dan bukan organisasi politik.

Hal yang kerap menjadi rujukan Muhammadiyah dan Politik adalah Khittah Denpasar 2002 menyatakan “Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari da’wah *amar ma’ruf nahi munkar* dengan jalan mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban”.

Khittah itu menunjukkan wacana Kepribadian Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa peran serta

Persyarikatan adalah membangun keadaban politik. Kerja Muhammadiyah bukan dengan cara atau gaya partai politik.

Khittah Muhammadiyah juga dapat dijadikan sebagai pagar pembatas agar naluri ‘primitif’ (syahwat politik) perseorangan untuk berkiper dalam perjuangan politik kekuasaan (*power struggle*) atau disebut ‘politik praktis’ tidak menyeret-nyeret Muhammadiyah secara kelembagaan. Partai Politik itu sebagaimana juga kekuasaan negara sangatlah penting dan strategis, termasuk untuk menegakkan dakwah Islam melalui tangan negara. Tetapi, wilayah yang penting itu sengaja tidak dipilih oleh Muhammadiyah yang sejak kelahirannya telah memosisikan diri sebagai gerakan Islam non-politik dengan keyakinan bahwa dakwah di bidang pembangunan masyarakat pun tidak kalah penting dan strategisnya dengan perjuangan politik di jalur kekuasaan negara. (Haedar Nashir; 2010).

Dapat pula kita lihat 30 tahun sebelum Khittah Denpasar, seperti

Khittah Muhammadiyah tahun 1971 hasil dari Mukthamar ke-38 di Ujungpandang, menyebutkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dan afiliasi dengan partai politik atau organisasi apapun.

Sementara pada Mukthamar Muhammadiyah tahun 1978 di Surabaya dirumuskan khittah tentang partai politik, Muhammadiyah menyarankan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik atau organisasi apapun.

Perilaku Pimpinan Muhammadiyah dan Partai Politik

Penulis akan menelisik tentang hak politik warga atau pimpinan Muhammadiyah dalam pilihan-pilihan politiknya, akan dibagi dalam 3 periode, yakni Awal Kemerdekaan dan Orde Lama, Orde Baru serta Reformasi.

Pertama, di era Orde Lama, para pimpinan elite Muhammadiyah ikut mendirikan Masyumi (Majelis Syuro

Muslimin Indonesia) melalui Kongres Umat Islam Indonesia bersama Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam pada pada November 1945 bertempat di Gedung Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, Muhammadiyah juga menjadi Anggota Istimewa Partai Masyumi, pun banyak pula kader-kader Muhammadiyah yang ditempatkan dalam Kabinet, seperti Natsir, Juanda, dan lain-lain.

Dinamika dalam politik memang sangat kental, akibatnya melalui Tanwir Muhammadiyah 1957, banyak peserta yang menginginkan agar Muhammadiyah keluar dari keanggotaan Masyumi, hal ini terus menjadi agenda pembicaraan di Tanwir 1958 dan Tanwir 1959. Bahkan pada Tanwir 1959 sampai terjadi voting tentang masih atau tidaknya di keanggotaan, hasilnya 13 orang ingin Muhammadiyah keluar, 18 orang ingin tetap dan 3 orang abstain.

Masih terjadi perdebatan, baru dalam pleno PP Muhammadiyah 1959 menyatakan keluar dari keanggotaan Masyumi.

Pasca keluar, suasana demokrasi di era reformasi lebih adem ayem, sehingga tak banyak yang melibatkan politik keummatan sampai terjadinya G 30 S-PKI dan dimulainya era orde baru.

Kedua, di Era Orde Baru awal Presiden Soeharto, Muhammadiyah juga lebih banyak menyibukkan diri dengan kegiatan organisasi internal, seperti penataan structural, memperbanyak anggota, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan aktifitas keorganisasian lainnya.

Di samping itu, Ketua PP Muhammadiyah, K.H. AR. Fachruddin (1968-1990), tidak begitu tertarik dengan urusan politik, sebagai seorang da'I murni yang hari-hari hanya berdakwah di tengah-tengah masyarakat.

'Syahwat' Politik Muhammadiyah baru muncul ketika Presiden Soeharto sudah mulai menunjukkan penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kader-kader muda Muhammadiyah sudah mulai gelisah dengan kepemimpinan di era Orde Baru. Amien Rais di tahun 1993 sudah mulai

keluar dari zona amannya sebagai akademisi dengan pidato nya Sukses Nasional.

Ketiga, di Era Reformasi sampai saat ini, akan lebih banyak warga atau pimpinan Muhammadiyah yang terjun langsung ke dunia politik praktis, era ini akan di mulai dari pasca lengsernya Orde Baru. Cerita fenomenal Amien Rais, sebagai Bapak Reformasi, mengawali dari kiprah politik para pimpinan persyarikatan, meskipun sejarah berkibarnya Amien Rais dkk tak bias dilepaskan dari dominasi Soeharto di era Orde Baru, namun terbentuknya PAN dan beberapa partai lain ini adalah zaman orde baru atau sesudah 1998.

Amien Rais yang terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar 1995 di Aceh, mulai menyinggung tentang keberadaan Presiden yang sudah terlalu lama berkuasa, melalui gagasan *high politic* nya, Amien bersuara lantang untuk perlunya dilakukan reformasi, padahal posisinya saat itu jelas sebagai orang nomor 1 di organisasi Muhammadiyah.

Dalam Tanwir Muhammadiyah di Semarang pada 5-7 Juli 1998 banyak desakan dari peserta agar Muhammadiyah mendirikan partai dan dapat tampil di panggung politik, terlebih dengan keberhasilan Amien Rais dkk dalam menggulingkan Soeharto yang saat itu sangat dominan, sehingga Amien di nilai memiliki jiwa politik yang tinggi, apalagi akan di adakan Pemilu pada tahun 1999, ini merupakan momentum bagi Amien Rais.

Namunlagi-lagi, Muhammadiyah menunjukkan kesetiannya pada garis perjuangan sebagai organisasi dakwah, hasil Sidang Tanwir itu menegaskan, Muhammadiyah tetap tidak akan berpolitik praktis sesuai dengan keputusan Mukhtamar 1971 di Makassar. Tetapi Muhammadiyah membebaskan anggotanya untuk menentukan pilihan dan berpartisipasi dalam setiap perhelatan politik di tanah air. Dari sinilah, PAN lantas digagas sebagai salah satu pilihan wadah aspirasi politik warga Muhammadiyah kendati terbuka pula untuk semua kalangan.

PAN tampaknya sekaligus menjadi puncak politik Amien Rais yang pada 1998 itu juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah namun belakangan Mundur setelah PAN berdiri dan digantikan oleh Ahmad Syafi'i Maarif.

Selain PAN, para kader dan pimpinan Muhammadiyah juga sudah mulai 'ekspansi' ke berbagai partai, katakanlah Din Syamsuddin dan Hadjriyanto Y Thohari yang berlabuh ke Golkar, walaupun Din Syamsuddin belakangan mundur, juga ada di PDI Perjuangan dan beberapa partai lainnya.

Di Tanwir NTB 2004, lagi-lagi muncul ide dari peserta agar Muhammadiyah terjun langsung sebagai Organisasi Politik, ini di tangkap oleh anak-anak muda Muhammadiyah seperti Imam Addaruqutni (Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah) dan Ahmad Rofiq (Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), walupun dalam kenyataannya PMB tidak memperoleh suara yang signifikan dan

saat ini sudah tidak lagi terdaftar sebagai Pemilu.

Kebebasan warga Muhammadiyah dalam memutuskan langkah Politik nya masih terus terpelihara hingga saat ini, bahkan dalam pertemuan Kader Politik Muhammadiyah tahun 2018 di Jakarta yang di gagas oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, semua di kumpulkan agar Muhammadiyah memainkan politik gula dan garam seperti yang sering disampaikan Buya Syafi'i yang memberikan efek rasa dimanapun rumah partainya.

Maka tak heran banyak kader Muhammadiyah lintas partai pada saat ini, Sebut saja Raja Juli Antoni (Sekjen Partai Solidaritas Indonesia) dan Danik Eka Rahmanningtyas (Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia) yang keduanya pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, atau Ahmad Rofiq (Sekjen Perindo), dan di sejumlah Partai lainnya.

Dalam peristiwa yang penulis sajikan di atas, Muhammadiyah masih

memegang teguh haluannya sekaligus mempertegas Muhammadiyah lebih besar dari Partai Politik sekalipun.

Berjuang Melalui Konstitusi

Politik Kebangsaan yang dimainkan oleh Muhammadiyah salah satunya adalah melalui Jihad Konstitusi. Dengan caranya, Muhammadiyah ikut mengkaji Undang-undang yang di rasa akan membawa lebih banyak kemudharatan dibanding kebijakan maka akan di 'Judicial Review' sesuai dengan amanat UUD 1945. Tentu dengan caranya sendiri. Sehingga rumah besar Indonesia ini tetap sesuai arahnya. Jihad Konstitusi ini mulai digalakkan di perodesasi Ketua Umum Din Syamsuddin (2005-2015), bahkan ini di deklarasikan pada Muktamar 2010 di atau Muktamar Satu Abad di Jogjakarta.

Gerakan ini merupakan pembaharuan di bidang hukum melalui jalur formal, yakni dengan mengajukan materi kepada Lembaga Mahkamah Konstitusi jika Undang-Undang tersebut di rasa bertentangan dengan UUD 1945.

Tonggak bersejarah bagi Jihad Konstitusi Muhammadiyah ini adalah ketika menang terhadap UU Minyak dan Gas Bumi dengan nomor putusan 36/PUU-X/2012 adalah gugatan pertama yang sekaligus menjadi kemenangan pertama bagi Organisasi Pembaharuan ini.

Dampak putusan itu mengejutkan banyak pihak. Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh pasal tentang kedudukan, fungsi, dan tugas Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Mahkamah menganggap keberadaan BP Migas inkonstitusional dan karenanya harus dibubarkan. Putusan ini memberikan pukulan telak bagi industri migas di Tanah Air. (Tempo)

Selain UU BP Migas, Muhammadiyah sudah memenangkan 3 UU lainnya, yakni UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, serta UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Tak Cuma itu, Muhammadiyah juga sedang menggagas Judicial Review terhadap

sejumlah UU yang controversial. Bahkan, Din Syamsuddin menyebutkan tak kurang dari 115 UU yang bermasalah dan di duga melanggar konstitusi.

Jihad Konstitusi ini Muhammadiyah juga menyebutkan sebagai upaya dalam meluruskan kiblat bangsa, setelah seabad lalu pendiri Muhammadiyah, Ahmad Dahlan berhasil meyakinkan pengurus gede masjid Kauman untuk meluruskan kiblat sholat, kini Muhammadiyah di Abad kedua berjuang pula dalam meluruskan kiblat bangsa agar sesuai dengan yang di amanatkan UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar Negara.

Muhammadiyah Sebagai Solusi Kebangsaan

Muhammadiyah yang hadir sebelum Bangsa ini merdeka tentu menyadari akan peran civil society sebagai sebuah ciri Negara Maju dalam ikut mengambil langkah-langkah penting, terlebih yang berhubungan dengan persoalan kebangsaan. Adanya pressure dari lembaga sebesar Muhammadiyah akan terus mewarnai

jejak perjuangan dan kemajuan bangsa ini.

Muhammadiyah ingin meletakkan dan mengintegrasikan nilai keislaman dipadukan dengan ke Indonesiaan dalam bingkai Pancasila sebagai sebuah pandangan luhur berkehidupankebangsaan.

Muhammadiyah dan umat Islam adalah bagian kesatuan bangsa yang telah berkiprah dan membangun Indonesia dari masa penjajahan sampai era globalisasi saat ini.

Seluruh eleme bangsa harus memahami betul arti dari kesepakatan, namun sebagai wujud perjanjian yang luhur bangsa dan negara Republik Indonesia, sekaligus membangunnya secara sungguh-sungguh menjadi negara dan bangsa berkemajuan di segala bidang kehidupan.

Kemudian, Muhammadiyah dengan dasar pikiran Negara Pancasila sebagai '*Darul Ahdi Wa Syahadah*' dan pandangan Islam Berkemaiuan, paham dan gerakan yang mewajibkan berdirinya negara Khilafah Islamiyah di Indonesia tidaklah sejalan, bahkan

bertentangan dengan konstitusi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam pandangan keislaman dan pengalaman seiarah Islam, tidak ada satu sistem politik dan bentuk negara yang tunggal dan absolut yang ditetapkan secara mutlak oleh nash ajaran (qothiy), sehingga pilihan sistem politik apapun merupakan pemuiudan dari utihad yang bersifat muamalah keduniawian dalam prinsip-prinsip ajaran Islam. (Haedar Nashir ; 2010).

Muhammadiyah juga menolak paham sistem kekhalifahan Islam yang disertai sikap mendegasikan pilihan politik Islam lainnya dengan menuding sebagai sistem di luar Islam terlebih apabila disertai gerakan untuk mengganti Sistem politk yang telah berlaku pada setiap negara Islam atau negara Muslim.

Muhammadiyah menolak dan tidak mendukung segala paham, eksistensi organisasi, dan gerakan anti Pancasila lainnya yang berusaha mengganti Dasar Negara Pancasila dan NKRI atau mengembangkan paham, ideologi, dan

gerakan yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara. Termasuk di dalamnya paham dan gerakan Komunisme maupun paham yang ingin menjadikan atau membawa Indonesia menjadi negara sekuler.

Simpulan

Misi Dakwah dan sebagai gerakan tajdid (Pembaharuan) adalah fakta yang tak terbantahkan terhadap lahirnya Muhammadiyah lebih dari satu abad silam. Bagaimana Kyai Dahlan berpikir maju tentang mendirikan sekolah, merubah arah kiblat Masjid Gede Kauman, teologi Al-Maun dengan memberdayakan masyarakat sekitar adalah contoh gerakan Muhammadiyah yang masih terpatri dalam setiap sanubari pimpinan persyarikatan sampai saat ini.

Namun persinggungan yang akhirnya terbentur dengan nilai nilai kebangsaan yang membuat Muhammadiyah keluar dari 'sarang' nya tersebut. Tapi tentu ini hal yang tak terhindarkan, Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas terbesar di Indonesia dalam praktik dakwahnya pasti akan

terseret dinamika kehidupan berkebangsaan. Muhammadiyah yang sudah mengikrarkan konsep 'Darul Ahdi Wassyahadah' ini dapat dipastikan akan selalu berada di jalannya, yakni jalan kebangsaan di dalam Negara Pancasila, Indonesia.

Referensi

- Jurdi, Syarifudin. 2010. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Dalam Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaifulloh. 2004. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*. Yogyakarta; Grafiti.
- Nashir Haedar. 2006. *Dinamika Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta. UMM Press.
- Asyari Suaidi. 2005. *Nalar Politik NU Dan Muhammadiyah*. Jakarta. LKiS.
- Jurdi, Syarifudin. 2004. *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Efendi, David. 2015. *Politik Elite Muhammadiyah*. Yogyakarta; Reviva Cendikia

Nakamura, Mitsuo. 2015. *Muhammadiyah Menjemput Perubahan*. Jakarta; Kompas

Syaifullah. 2010. *Refleksi Satu Abad Muhammadiyah*. PWMBPress